



PENGARUH INFLASI DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2022

Imas Sadiyah^{1)*}, Husain Riry²⁾, Amaliah³⁾

imassadiyah99@gmail.com, husainriry19@gmail.com,

amaliahamell26@gmail.com

^{1) 2) 3)} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Informasi Artikel

Terima 08/08/2024
Revisi 05/02/2025
Disetujui 21/02/2025

Kata Kunci:

Inflasi, Laju
Pertumbuhan
Penduduk,
Kemiskinan,
Provinsi Banten,
Analisis Regresi

Keyword:

Inflation,
Population
Growth, Poverty,
Banten Province,
Regression
Analysis

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan dan menganalisis pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari buku, jurnal, website, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Uji normalitas, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji parsial (uji T) adalah digunakan untuk melakukan analisis. Hasil uji F menunjukkan bahwa inflasi dan laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten secara simultan, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji parsial atau uji T menunjukkan bahwa inflasi dan laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

A B S T R A C T

The aim of this research is to show and analyze the influence of inflation and population growth rate on poverty in Banten Province. This study uses a quantitative approach. The data used comes from books, journals, websites, and the Central Statistics Agency (BPS) of Banten Province from 2018 to 2022. Normality test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, F test, and partial test (T test) are used to carry out analysis. The results of the F test show that inflation and population growth rate do not influence the poverty level in Banten Province simultaneously, so H_0 is accepted and H_a is rejected. The results of the partial test or T test show that inflation and population growth rate have no effect on the poverty level in Banten province.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merujuk pada kondisi penduduk yang tidak memiliki akses cukup terhadap sumber daya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka tidak mempunyai apa-apa selain upah minimum disyaratkan atau di bawah garis kemiskinan, yang sangat bervariasi dan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari penduduk yang terkena dampaknya. (BPS, 2021)

Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. (Kompas, 2020)

Kemiskinan menjadi tantangan utama dalam perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Upaya ini telah dilakukan dengan merumuskan kebijakan dan masterplan pembangunan jangka Panjang dan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi kemiskinan (Irhamni, 2017). Kesejahteraan rakyat tercapai saat mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, namun banyak negara menghadapi tantangan ketidakmampuan masyarakat dalam mencapai hal tersebut (Suliswanto, 2010). Kemiskinan bisa muncul karena individu-individu dalam masyarakat tidak berpartisipasi secara maksimal, maupun karena transformasi yang sulit dalam faktor produksi atau kualitas yang tidak maksimal (Arsyad, 2010).

Dari sudut pandang konseptual, kemiskinan dibagi menjadi kategori absolut dan relatif. Kemiskinan absolut adalah tingkat kecacatan yang didasarkan pada standar absolut yang dikenal dengan garis kemiskinan, titik kemiskinan, atau ambang batas kemiskinan. Namun kemiskinan relatif merupakan ukuran seberapa besar pengaruh faktor lain terkait distribusi atau proporsi terhadap kemiskinan (Nugroho & Dahuri, 2012). Ketergantungan penduduk terhadap suatu wilayah dapat mempengaruhi ambang kemiskinan suatu wilayah berdasarkan konteks sebarannya (Taryono et al., 2009).

Berdasarkan jumlah penduduk miskin di perkotaan provinsi Banten bulan September yaitu 5,89 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin pedesaan bulan September 2022 yaitu 7,29 persen. Jumlah penduduk Provinsi Banten adalah 12.251.985 jiwa pada tahun 2022, menurut survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik

(BPS, 2022). Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada demi kesejahteraan umum Provinsi Banten.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribuan Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	116.16	114.09	120.44	131.43	114.65
Kab Lebak	108.81	107.93	120.83	134.75	117.22
Kab Tangerang	190.05	193.97	242.16	272.35	270.52
Kab Serang	64.46	61.54	74.80	83.09	75.45
Kota Tangerang	103.49	98.37	118.22	134.24	132.88
Kota Cilegon	13.96	13.20	16.31	18.89	16.46
Kota Serang	36.21	36.21	42.24	47.91	42.56
Kota Tangerang Selatan	28.21	29.16	40.99	44.57	44.29
Provinsi Banten	661.36	654.46	775.99	867.23	814.02

Selama periode 2018-2022, penduduk miskin terendah berada diwilayah Kota Cilegon. Hal ini disebabkan karena banyaknya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, terjadinya peningkatan pada daya beli masyarakat, pemberian bantuan sosial dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan penduduk miskin tertinggi Provinsi Banten pada periode 2018-2022 berada di Kabupaten Tangerang. Peningkatan disebabkan mahalannya harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tangerang dibandingkan pendapatan masyarakat pada umumnya. (BPS Banten, 2023)

Salah satu dampak utama kemiskinan adalah inflasi, yang didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang konsisten. Dengan kata lain inflasi dapat diartikan sebagai perubahan harga berbagai barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga dengan ruang yang kecil (Sukirno, 2021). Beberapa produk atau jasa mungkin mengalami fluktuasi harga, sementara barang lainnya tetap stabil atau bahkan mengalami penurunan harga.

Tingginya tingkat inflasi dengan pendapatan tetap dapat menyebabkan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. (Noripin, 2009). Dapat dilihat pada tabel inflasi di bawah pergerakan inflasi dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan fluktuasi yang signifikan, terutama disebabkan oleh perubahan inflasi harga pangan dan pangsa produk yang ditentukan oleh pemerintah. Di tahun 2018, inflasi tertinggi pada

bulan April sebesar 3.80 persen, sedangkan inflasi tertinggi tahun 2022 terjadi pada bulan sebesar 5,86 persen. Peningkatan inflasi ini karena kenaikan harga barang, banyaknya permintaan nilai tukar rupiah pada hari raya, dan lainnya. sebesar 5,86 persen. Peningkatan inflasi ini karena kenaikan harga barang, banyaknya permintaan nilai tukar rupiah pada hari raya, dan lainnya.

Tabel 2. Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Bulan di Provinsi Banten

Bulan	Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Bulan di Provinsi Banten				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	3.47	3.55	2.85	1.37	2.16
Februari	3.23	3.30	3.03	1.38	1.99
Maret	3.55	2.97	2.99	1.39	3.00
April	3.80	3.14	2.99	1.31	3.82
Mei	3.35	3.54	2.66	1.49	3.77
Juni	3.00	3.72	2.50	1.15	4.62
Juli	3.47	3.53	2.01	1.24	4.88
Agustus	3.68	3.76	1.52	1.46	4.58
September	3.42	3.64	1.63	1.40	5.86
Oktober	3.44	3.77	1.57	1.38	5.64
November	3.49	3.73	1.43	1.43	5.34
Desember	3.42	3.30	1.45	1.91	5.08

Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan melibatkan pertumbuhan populasi, dengan perspektif yang mengikuti teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk berkembang secara eksponensial sementara pertumbuhan pangan berlangsung secara linear (Nasikun, 2001). Pertumbuhan penduduk mencakup perubahan jumlah individu dalam populasi pada suatu waktu, dihitung dengan menggunakan "per waktu unit" sebagai metode pengukuran. Proses ini melibatkan perubahan jumlah dan komposisi penduduk, yang dipengaruhi oleh tiga elemen demografi utama: migrasi, kematian, dan kesuburan.

Adapun masalah kemiskinan terkait dengan tingginya jumlah penduduk, yang dapat menyebabkan peningkatan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang terus-menerus bisa berdampak negatif pada ekonomi dan melambatkan prospek pembangunan, seperti diungkapkan oleh Dumairy pada tahun 1996. Menurut penelitian oleh Isramiwarti et al. (2017), pengeluaran daerah memiliki peran krusial dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengaruh positif terhadap jumlah penduduk. Studi-studi lainnya,

seperti yang dilakukan oleh Syahza dkk (2018), Zebua dkk (2015, 2017), dan Fatria (2020), menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lapangan pekerjaan, potensi lokal, sarana dan prasarana, serta dana pemerintah juga turut membantu pengetasan kemiskinan. Jika tidak ada kemajuan pada faktor produksi lainnya, peningkatan populasi dapat menurunkan permintaan, tingkat upah, dan biaya produksi. Biaya produksi yang minimum mungkin meningkatkan profit bagi kapitalis, mendorong produksi, namun efek ini bersifat sementara karena permintaan efektif akan menurun seiring waktu, mengakibatkan penurunan pendapatan buruh (Todaro & Stephen, 2000).

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	0.32	0.24	0.99	1.64	1.54
Kab Lebak	0.60	0.52	1.38	2.03	1.93
Kab Tangerang	3.01	2.93	1.32	1.97	1.87
Kab Serang	0.53	0.46	1.42	2.07	1.97
Kota Tangerang	2.12	2.04	0.51	1.16	1.05
Kota Cilegon	1.46	1.37	1.46	2.11	2.01
Kota Serang	1.68	1.59	1.76	2.42	2.31
Kota Tangerang Selatan	3.13	3.04	0.47	1.12	1.01
Provinsi Banten	1.94	1.87	1.10	1.76	1.66

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Tangerang Selatan memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sekitar 3,13 persen pada tahun 2018, sedangkan Kabupaten Pandeglang memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu sekitar 0,32 persen pada tahun 2018.

Penelitian ini akan fokus pada pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2018 hingga 2022, sesuai dengan literatur sebelumnya. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Ingin menunjukkan serta menganalisis Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2018-2022. 2) Ingin menunjukkan serta menganalisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2018-2022. 3)

Ingin menunjukkan serta menganalisis Pengaruh Inflasi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2018-2022.

KAJIAN LITERATUR

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. Menurut Todaro dan Smith (2015), kemiskinan dapat diukur melalui indikator seperti tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kualitas lingkungan tempat tinggal. Di Indonesia, kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mempertimbangkan pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar. Faktor-faktor lain seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan sosial juga berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu wilayah (Todaro & Smith, 2015). Penelitian terdahulu oleh Ravallion dan Chen (2003) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, terutama jika tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata. Studi lain oleh Alkire dan Foster (2011) menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam mengukur kemiskinan, yang mencakup faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas (Ravallion & Chen, 2003; Alkire & Foster, 2011).

Inflasi dan Kemiskinan

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu (Mankiw, 2018). Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, sehingga meningkatkan angka kemiskinan (Blanchard, 2020). Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan harga kebutuhan pokok semakin mahal, yang berujung pada penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin (Mankiw, 2018). Studi yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2021) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama di daerah dengan struktur ekonomi berbasis konsumsi (Blanchard, 2020; Wulandari et al., 2021). Penelitian terdahulu oleh Easterly dan Fischer (2001) menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Studi lain oleh Bruno dan Easterly (1998) juga menemukan bahwa inflasi yang tinggi cenderung

memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperlambat pengurangan kemiskinan (Easterly & Fischer, 2001; Bruno & Easterly, 1998).

Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kemiskinan

Laju pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika ekonomi suatu daerah. Menurut Kuznets (1955), pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memperburuk kemiskinan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menekan ketersediaan sumber daya, seperti lapangan pekerjaan, perumahan, dan layanan sosial, yang berakibat pada peningkatan tingkat kemiskinan (Kuznets, 1955). Studi oleh Prasetyo dan Firdaus (2019) menemukan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia sering kali tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, sehingga memperburuk tingkat kemiskinan (Prasetyo & Firdaus, 2019). Studi terdahulu oleh Kelley dan Schmidt (2005) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa peningkatan produktivitas ekonomi dapat meningkatkan beban sosial dan ekonomi suatu negara. Bloom et al. (2001) juga menemukan bahwa transisi demografi yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan dalam jangka panjang (Kelley & Schmidt, 2005; Bloom et al., 2001).

Studi Empiris di Provinsi Banten

Provinsi Banten mengalami dinamika sosial ekonomi yang cukup kompleks. Studi oleh Setiawan (2020) menunjukkan bahwa inflasi di Banten cenderung lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Jawa, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat miskin. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan Banten, seperti Tangerang dan Serang, menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lapangan kerja yang tidak selalu terpenuhi, sehingga memperburuk angka kemiskinan (Setiawan, 2020; Santoso, 2021). Perkembangan sektor industri dan jasa di Banten juga tidak selalu memberikan dampak positif bagi kelompok masyarakat miskin karena rendahnya akses mereka terhadap pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja (Yulianti et al., 2022). Penelitian oleh Yulianti et al. (2022) menemukan bahwa pertumbuhan sektor industri di Banten lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan keterampilan menengah ke atas, sehingga kelompok berpenghasilan rendah masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak (Yulianti et al., 2022). Studi lain oleh Rahmawati dan Siregar (2021) juga

menyatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Banten perlu lebih inklusif agar dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rahmawati & Siregar, 2021).

Berdasarkan kajian literatur, inflasi dan laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali meningkatkan jumlah penduduk miskin karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Studi di Provinsi Banten menunjukkan bahwa kedua variabel ini berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan dalam periode 2018-2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut sejauh mana pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dalam kurun waktu tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari kedua faktor tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data dikumpulkan, diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk angka-angka. Data yang diolah berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2018–2022. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS 25. Penulis menggunakan lokasi penelitian di wilayah Provinsi Banten untuk menganalisis penelitian ini yaitu pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan. Jenis datanya adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, dengan berupa angka-angka kuantitatif dari tahun 2018 hingga 2022. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa instansi terkait, berbasis web dan informasi lainnya terkait penelitian ini. Penulis dapat mengumpulkan informasi dengan cara seperti merujuk kepada sumber data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, menjelajahi situs web, dan menggunakan sumber lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda menggunakan software SPSS 25

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi permasalahan kemiskinan. Jumlah kemiskinan di provinsi

ini menunjukkan fluktuasi selama 5 tahun terakhir, mencapai 6,16% pada tahun 2022 dan naik menjadi 6,17% pada bulan September.

Inflasi di Banten mencapai 5,08%, termasuk dalam kategori ringan karena angkanya berada di bawah 10%. Penting untuk mengontrol laju inflasi karena jika tidak, kemungkinan meningkatnya tingkat kemiskinan di provinsi tersebut akan menjadi dampaknya. Peningkatan harga barang yang berlangsung terus-menerus bisa membuat masyarakat menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel

TAHUN	INFLASI (X1)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (X2)	KEMISKINAN (Y)
2018	3.42	1.94	5.24
2019	3.30	1.87	5.09
2020	1.45	1.10	5.92
2021	1.91	1.76	6.66
2022	5.08	1.76	6.16

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menilai suatu kelompok variabel, tujuan uji normalitas adalah untuk menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal.

One- Sample Kolmogorov- Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,62298988
		Absolute ,241

Most Extreme Differences	Positive	,241
	Negative	-,166
Kolmogorov-Smirnov Z		,241
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah 2023, bersumber dari BPS dan SPSS 25.

Berdasarkan hasil output SPSS 25 di atas mengindikasikan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ yang diartikan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan data tersebut memiliki distribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas untuk model regresi dianggap terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diartikan sebagai analisis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana inflasi dan laju pertumbuhan penduduk mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Banten. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \epsilon$$

Keterangan:

Y: Variabel Dependent

a : Koefisien Konstanta

b : Koefisien Regresi

X: Variabel Independent

E: Error

Dibawah ini merupakan tabel atas perhitungan regresi linear berganda dari software SPSS 25, yaitu sebagai berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,713	2,291		2.930	.099

Inflasi	-,035	,383	-,077	-.092	.935
Laju Pertumbuhan Penduduk	-,470	1,628	-,242	-.289	.800

Sumber: Data diolah 2023, bersumber dari BPS dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dijelaskan persamaan regresi adalah:

$$\gamma = 6,713 + (-0,035X1) + (-0,470X2)$$

Hasil persamaan dan interpretasi dari analisis regresi linier berganda adalah: $\alpha = (6,713)$ Dengan demikian, jika variabel independen yaitu inflasi dan laju pertumbuhan penduduk dengan nilai nol satuan, maka variabel dependent atau tingkat kemiskinan di provinsi Banten meningkat sebanyak 6,713 satuan. $\beta_1 = (-0,035)$ Dengan demikian, apabila variabel kemiskinan mengalami perubahan atau naik satuan, maka variabel inflasi akan mengalami perubahan menjadi (-0,035) satuan. Selain itu, karena variabel inflasi bernilai negatif(-), artinya perubahan yang mengakibatkan inflasi terhadap tingkat kemiskinan memiliki arah berlawanan. $\beta_2 = (-0,470)$ Dengan demikian, jika variabel kemiskinan mengalami perubahan atau naik satuan, maka variabel laju pertumbuhan penduduk berikutnya akan meningkat menjadi (-0,470) satuan. Selain itu, karena variabel laju pertumbuhan penduduk berikutnya bernilai negatif(-), artinya perubahan yang akan timbul adalah laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan memiliki arah berlawanan.

Koefisien Determinasi (R²)

R² adalah sebuah koefisien yang digunakan untuk menentukan proporsi variasi suatu variabel terikat (kemiskinan) yang diterangkan oleh variabel bebas (inflasi dan keterlambatan pertumbuhan pasien) secara konsisten.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.295 ^a	.087	-.826	.88104

Sumber: Data diolah 2023, bersumber dari BPS dengan SPSS 25

Hasil Uji
Koefisien
Determinasi

Berdasarkan hasil analisis di atas, R Square senilai 0,087 maka kedua variabel bebas (inflasi dan laju pertumbuhan penduduk) memberikan kontribusi sebesar 8,7% terhadap variasi variabel terikat (kemiskinan). Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dapat diterangkan oleh variabel inflasi dan laju pertumbuhan penduduk senilai 8,7% dan sisanya sebesar 91,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke model penelitian ini.

Uji F

Uji F merupakan suatu metode untuk menilai bagaimana pengaruh bersama-sama dari semua variabel independent (inflasi dan laju pertumbuhan penduduk) terhadap variabel dependent (kemiskinan) dalam sebuah penelitian. Selain itu, uji F ini digunakan untuk menguji tingkat signifikansi model regresi yang telah dibuat, menentukan apakah signifikansi atau tidak.

ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0.148	2	0.074	0.095	0.913b
Residual	1.552	2	0.776		
Total	1.700	4			

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

b. Predictors: (Constant), LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, INFLASI

Sumber: Data diolah 2023, bersumber dari BPS dengan SPSS 25.

Hasil Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 25, menunjukkan bahwa F hitung senilai 0,095 dan tingkat signifikansi sebesar 0,913. Untuk standar nilai signifikansi senilai 0,05 atau 5% maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

Uji T

Uji T (uji parsial) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh antara variabel independent (inflasi dan laju pertumbuhan penduduk) terhadap variabel dependen (kemiskinan) di Provinsi Banten secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 25 didapat hasil berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,713	2,291		2.930	.099
	Inflasi	-,035	,383	-,077	-.092	.935
	Laju Pertumbuhan Penduduk	-,470	1,628	-,242	-.289	.800

Berdasarkan hasil output SPSS 25 di atas, didapat hasil sebagai berikut:

Berdasarkan analisis uji t, inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten, dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung senilai -0,092 dengan tingkat signifikansi senilai 0,935 > 0,05. Berdasarkan hasil signifikansi tersebut di atas maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Berdasarkan analisis uji t, ditemukan bahwa nilai signifikansi untuk laju pertumbuhan penduduk adalah 0.800 > 0.05. Maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

Hasil analisis regresi dengan menggunakan program software SPSS 25 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Koefisien sebesar -0,035 mengindikasikan bahwa kenaikan satu satuan tingkat kemiskinan berkorelasi dengan peningkatan inflasi sebesar -0,035. Inflasi di Provinsi Banten dari 2018 hingga 2022 tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan, karena tingkat inflasi yang ringan tidak selalu berdampak negatif, melainkan juga dapat membawa dampak positif. Dampak positifnya adalah bahwa inflasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong aktivitas masyarakat untuk bekerja, berinvestasi, dan menabung. Pemprov Banten juga memberikan bantuan pada saat harga pangan naik yang dapat menyebabkan inflasi, seperti bantuan Raskin, PKH, dan lain-lain. Selain itu, hal ini sejalan dengan penelitian Dwi Puspa Hambarsari dan Kunto Inggit pada tahun

2016 yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur 2004-2014, yang menemukan bahwa inflasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Korelasi negatif dan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

Berdasarkan analisis regresi dengan software SPSS 25, kesimpulannya tidak ada pengaruh yang signifikan antara laju pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan. Koefisien $-0,470$ menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan dalam tingkat kemiskinan tidak secara signifikan memengaruhi pertumbuhan penduduk, namun cenderung menunjukkan peningkatan sebesar $-0,470$. Peningkatan jumlah penduduk di Banten dari 2018 hingga 2022 tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kemiskinan, karena pertumbuhan penduduk yang terjadi selama periode tersebut dapat dikelola, seperti yang terlihat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu tinggi di provinsi Banten. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk tidak memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Banten berupaya mengawasi laju pertumbuhan penduduk melalui BKKBN menggunakan program Keluarga Berencana. Efektivitas langkah ini terlihat dari tren penurunan pertumbuhan penduduk di Jawa Timur dari 2018 hingga 2020, namun mengalami peningkatan pada 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022.

Pemerintah provinsi Banten membuat upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi keluarga yang termasuk dalam kategori miskin. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pendidikan dan ekonomi, dengan harapan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Upaya ini melibatkan bantuan seperti Bantuan Siswa Miskin, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan sebagainya. Penelitian diatas tidak sesuai dengan penelitian Kevin, Aning Kusuma Putri & Aji Nasrun pada tahun 2020 dalam jurnal yang membahas pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan tahun 2011-2018. Studi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di provinsi wilayah Sumatera bagian Selatan, tidak diimbangi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian tentang Pengaruh Inflasi dan Laju Perumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2018-2022, menemukan bahwa variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,935 > 0,05$. Selain itu, variabel laju pertumbuhan penduduk juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Hasil tersebut diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar $0,800 > 0,05$. Oleh karenanya, hasil uji F menunjukkan bahwa inflasi dan laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten.

Korelasi antara variabel terikat atau variabel dependen (tingkat kemiskinan) di Provinsi Banten dengan variabel bebas atau variabel independen (inflasi) dan laju pertumbuhan penduduk mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai sebesar $0,295$. Nilai koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini sebesar $0,087$ atau $8,7\%$ yang mewakili tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Hal ini dapat dijelaskan oleh variabel inflasi dan persentase laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar $8,7\%$ dan sisanya sebesar $91,3\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Dari hasil penelitian diatas, bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara inflasi dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola pertumbuhan penduduk secara lebih baik. Untuk tahap penelitian berikutnya, disarankan untuk melanjutkan pengembangan riset ini dengan melibatkan sejumlah data yang lebih besar atau mencakup periode sepuluh tahun terakhir untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian. Selain itu, diharapkan agar penelitian dapat diperkaya dengan penambahan variabel atau pemanfaatan variabel lainnya guna mencapai tingkat akurasi dan ketepatan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Garis Kemiskinan dan Profil Kemiskinan di Indonesia*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. (2023). *Statistik Kemiskinan Provinsi Banten 2018-2022*. BPS Banten.
- Badan Pusat Statistik. *Presentase Penduuduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2005-2022*. <https://banten.bps.go.id/indicator/23/78/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten-.html>
- Badan Pusat Statistik. *Laju Pertumbuhan Penduuduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2011-2022*. <https://banten.bps.go.id/indicator/12/144/1/laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Badan Pusat Statistik. *Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Bulan di Provinsi Banten, 2011-2022*. <https://banten.bps.go.id/indicator/3/219/1/inflasi-tahun-ke-tahun-menurut-bulan-di-provinsi-banten.html>
- Dwi Puspa Hambarsari, Kunto Inggit. 2016. ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2004-2014. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Volume 1, Nomor 2. Hal 257 - 282.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). *Counting and multidimensional poverty measurement*. Oxford University Press.
- Blanchard, O. (2020). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2001). *Economic growth and the demographic transition*. National Bureau of Economic Research.
- Bruno, M., & Easterly, W. (1998). Inflation crises and long-run growth. *Journal of Monetary Economics*, 41(1), 3-26.
- Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the poor. *Journal of Money, Credit, and Banking*, 33(2), 160-178.
- Kelley, A. C., & Schmidt, R. M. (2005). Population and development: Old debates and new directions. *Population and Development Review*, 31(1), 1-20.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Prasetyo, Y., & Firdaus, A. (2019). Laju pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 209-220.
- Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. *Economics Letters*, 78(1), 93-99.
- Rahmawati, S., & Siregar, S. (2021). Kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Regional*, 18(2), 115-124.
- Santoso, T. (2021). Urbanisasi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Banten. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 9(2), 56-62.
- Setiawan, D. (2020). Inflasi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(4), 234-245.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Wulandari, L., Mulyani, D., & Sulastri, N. (2021). Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia: Bukti empiris dari data panel. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 10-20.
- Yulianti, E., Rahmawati, I., & Hidayati, N. (2022). Pertumbuhan sektor industri dan dampaknya terhadap lapangan pekerjaan di Banten. *Jurnal Industri dan Pekerjaan*, 14(3), 135-150.
- Gerry Cahya Mutaqin, Ima Amaliah. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*. Vol. 2.

- No. 2. Hal 258-466.
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSES/article/view/8771/3712>
- Irhamni. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015 [Undergraduate Thesis]. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Indonesia.
- Kevin, Aning Kusuma Putri & Aji Nasrun. 2020. Pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan tahun 2011-2018. SOROT : Jurnal Ilmu-ilmu Sosia. Vol. 15. Nomor. (1), 33-42.
- Kompas.com. (2020). Kemiskinan: Definisi, Jenis, dan Faktor Penyebabnya.
- Nasir, M. 2014. Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Novella Luckytha Putri, Sri Muljaningsih. 2023. ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM, DAN ANGKA HARAPAN HIDUP TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN. JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES. Vol.2. No. 3. <https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/180/103>
- Praja, R. B., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. Ecoplan, 6(1), 78-86.
- Primandari, N. R. (2018). Inflasi dan tingkat kemiskinan di indonesia. Kolegial, 6(1), 57-67. <http://journals.stiedwisakti.ac.id/ojs/index.php/kolegial/article/view/72/67>
- Rudy Susanto, Indah Pangesti. 2020. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Journal of Applied Business and Economics (JABE). Vol. 5. No. 2. Hal 271-278.
- Ryan, Okta. 2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia 2009 - 2011. Skripsi FE UNNE
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2017). Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. Inovasi, 13(1), 19-27. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/2435/245>
- Sukirno, S. (2021). Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.